

## **Kemenkes dan KPPPA Akui Terima Dampak Negatif dari Murahnya Harga Rokok di Indonesia**

- *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Kesehatan akui kebijakan cukai rokok berdampak pada kinerja kementerian*
- *CISDI mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok*
- *Kementerian Kesehatan menggandeng masyarakat mengedukasi bahaya rokok*

**Jakarta, 13 Oktober 2021** – Pada perhelatan *launching* CISDI Magazine Vol. 02 bertajuk *Buntungnya Negara, Untungnya Industri (5/10)* yang digelar oleh Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat, drg. Kartini Rustandi, M.Kes mengakui bahwa harga rokok yang murah dan terjangkau memberikan dampak negatif.

“Kemenkes menjadi salah satu kementerian yang terdampak baik dari sisi indikator pencapaian maupun konseptual *framework*, di mana tugas kami adalah mengawal masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sehat,” ungkap drg. Kartini.

Indikator pencapaian yang dimaksud adalah pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019, yakni prevalensi merokok penduduk usia <18 tahun yang awalnya sebesar 7,2% di tahun 2014 ditargetkan menurun ke angka 5,4% di tahun 2019. Namun faktanya, Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak malah meningkat ke angka 9,1%.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KPPPA), Ir. Agustina Erni, M.Sc. mengeluhkan bahwa KPPPA juga terdampak dengan terjangkaunya rokok di tengah masyarakat.

“KPPPA berkewajiban melakukan koordinasi untuk melindungi anak-anak. Sehingga kenaikan prevalensi perokok anak menjadi tantangan bagi kami, terutama karena berbanding terbalik dengan target yang tercantum dalam RPJMN,” jelas Agustina.

Karena tidak memiliki kewajiban langsung terhadap kebijakan harga rokok, KPPPA mengupayakan pelarangan iklan dan promosi rokok. Salah satunya melalui penetapan pelarangan iklan rokok sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan Kota Layak Anak.

“Kami mendorong komitmen kepala daerah, bupati, dan walikota untuk mengurangi bahkan melarang iklan rokok,” tambah Agustina.

### ***Tobacco Tax Scorecard***

Dampak negatif yang dirasakan Kemenkes dan KPPPA sebenarnya sudah turut dibicarakan di ranah global, berdasarkan kajian *tobacco tax scorecard* yang diproduksi University of Illinois. *Scorecard* atau kartu penilaian merupakan indeks penilaian sistematis cukai tembakau negara-negara dunia.

Penilaian ini didasarkan pada komponen harga rokok, keterjangkauan rokok, persentase cukai, dan struktur cukai yang berlaku. Dari skala satu hingga lima (paling buruk ke paling baik), Indonesia memiliki nilai yang sangat buruk, yakni **tiga** untuk harga rokok,  **nol** untuk keterjangkauan rokok, **dua koma lima** untuk persentase cukai, dan **satu** untuk struktur cukai.

Menanggapi situasi tersebut, **Project Lead CISDI untuk Upaya Pengendalian Tembakau, Lara Rizka** mengatakan penyebab belum optimalnya pengendalian tembakau di Indonesia adalah regulasi. Pemerintah memberi peluang industri rokok tumbuh, seperti melalui pemberian cukai, namun tanpa pengaturan detail penjualan.

“Regulasi yang lemah membuat rokok bisa dibeli di mana saja. Berbeda dengan alkohol, barang kena cukai lain, rokok bisa dibeli satuan dan ditemukan di warung-warung. Apalagi, jenis-jenis rokok di Indonesia beragam dan tidak semuanya dikenai aturan penjualan yang ketat,” jelas Lara.

Pernyataan Lara menegaskan rekomendasi yang tercantum dalam CISDI Magazine vol.2, yakni: (1) memperbaiki koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian lain mengenai cukai tembakau, (2) menaikkan tarif cukai tembakau dengan signifikan, dan (3) menerapkan peta jalan penyederhanaan golongan tarif cukai.

drg. Kartini kembali menambahkan bahwa edukasi masyarakat terkait bahaya rokok juga perlu ditingkatkan. “Ayo kita bergandeng tangan, rekan-rekan muda dengan kreativitas, sementara kami (Kementerian Kesehatan) mengupayakan dari sisi regulasi,” ajaknya.

- 
1. Unduh CISDI Magazine Vol. 2 [di sini](#)
  2. Simak uraian peluncuran CISDI Magazine Vol. 2 [di sini](#)



### **Tentang CISDI Magazine Vol. 2**

CISDI Magazine Vol. 2 adalah majalah berkala tahunan yang diproduksi oleh Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dibantu oleh 15 relawan muda. Mengambil tema kerugian dan keuntungan akibat belum kuatnya kebijakan cukai rokok, majalah ini menjelaskan berbagai persoalan pengendalian tembakau di Indonesia serta menguraikan polarisasi kubu para pihak yang bertarung sengit dalam penentuan harga rokok.

### **Tentang CISDI**

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah *think tank* yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

### **Informasi lebih lanjut, sila hubungi:**

*Amru Sebayang*

*Content & Media Officer*

*0877-8273-4584*

*Email: [communication@cisdi.org](mailto:communication@cisdi.org)*

*[www.cisdi.org](http://www.cisdi.org)*